

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keunggulan dalam sumber daya hayati kelautan yang melimpah dan diakui sebagai negara maritim dengan tingkat keberagaman hayati laut tertinggi di dunia (Alifa, 2024). Indonesia menguasai 17.500 pulau dan garis pantai sekitar 108.000 kilometer, dengan berbagai sektor maritim yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan sangat diperlukan (Khoiriyah, 2024).

Sekitar 62 % area Indonesia terdiri dari laut dan perairan, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda 1957 dan pengakuan UNCLOS 1982 yang diadopsi dalam UU No. 17 tahun 1985. Luas keseluruhan wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta km², mencakup perairan teritorial serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketahanan pangan menjadi sebuah elemen penting untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia dan dalam konteks tersebut, konsep *blue economy* muncul sebagai pendukung yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan (Andaiyani et al., 2024).

Sektor ekonomi biru yang berkembang di Indonesia antara lain adalah perikanan tangkap, industri pengolahan hasil laut (Bappenas, 2021). Potensi sumber daya kelautan Indonesia diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar

USD 1,33 triliun per tahun, di mana sektor perikanan menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia bisa menjadi salah satu sumber investasi. Utama pembangunan, serta dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi negara dan masyarakat Indonesia jika dikelola secara inovatif dan baik, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Ini didasarkan pada informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 yang memprediksi potensi ini dapat mencapai USD 1338 miliar atau Rp19,6 triliun setiap tahun (Ramadhani & Andalas, 2023).

Indonesia pada tahun 2020, menjadi eksportir utama perikanan dunia di posisi ke-8, menunjukkan keunggulan relatif dalam sektor kelautan. Namun, sumbangan sektor kelautan terhadap PDB nasional hanya sekitar 20%, lebih rendah dibandingkan negara dengan potensi laut yang lebih sedikit seperti Islandia, Norwegia dan Jepang mampu menyumbang rata rata lebih dari 30%. Keadaan ini mengindikasikan besarnya potensi pengembangan ekonomi kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih sangat nyata. Pulau Jawa, meskipun hanya mencakup sekitar 15% dari total luas daratan Indonesia, menyumbang hampir 58% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan berfungsi sebagai pusat utama aktivitas ekonomi. (Rarasati et al., 2025) Sebaliknya, wilayah di luar Pulau Jawa yang mencakup sekitar 85% luas wilayah nasional hanya memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap perekonomian nasional.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi dan pembangunan antarwilayah yang signifikan. Ketimpangan pembangunan ini semakin buruk akibat kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah tertinggal, yang berdampak pada konektivitas dan distribusi ekonomi (Mu & Tjenreng, 2025). Lautan, mencakup dua pertiga permukaan bumi, memiliki peran krusial dalam mendukung sekitar 40% populasi yang tinggal di sepanjang tepi pantai (Shi et al., 2022).

Masih adanya kebijakan pemerintah yang masih berorientasi pada daerah daratan (*terrestrial*) yang menyebabkan pembangunan daerah kepulauan tidak merata. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain masih ada masyarakat di provinsi kepulauan yang masih menghadapi ketimpangan pembangunan.

Konsep *blue economy* atau ekonomi biru menjadi paradigma baru yang sangat relevan bagi daerah kepulauan. Konsep tersebut muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan di mana ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir yang berkelanjutan serta pengembangan sektor terkait yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga kelestarian ekosistem, serta memperkuat ketahanan pangan dan keuangan sambil melindungi lingkungan (Worldbank, 2017). Konsep ini menawarkan solusi atas ketimpangan pembangunan yang dialami daerah kepulauan dengan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Konteks ini, terdapat delapan provinsi kepulauan yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKSDK) yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik wilayah laut yang lebih luas dari wilayah darat. Delapan provinsi ini telah bersatu sejak 2015 untuk memperjuangkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi daerah kepulauan (Pemprov Bangka Belitung, 2023).

Delapan provinsi yang menjadi bagian dari BKSDK memiliki ciri khas sebagai daerah kepulauan dengan sumber daya kelautan yang berlimpah, tetapi juga menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Sebagai daerah kepulauan, provinsi-provinsi BKSDK menghadapi permasalahan pembangunan yang unik (Sumirat, 2019). Keterbatasan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah barat dan timur Indonesia (Rizkina et al., 2025).

Permasalahan pembangunan di provinsi yang terdiri dari pulau – pulau masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk NTB. Walaupun, menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, NTB mempunyai potensi sumber daya kelautan yang besar dan peluang signifikan untuk mendukung ekonomi masyarakat (Chandra et al., 2021). Ekonomi biru secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan dan produksi perikanan di Provinsi Banten (Indrajaya, 2022)

Mengingat signifikansi *blue economy* dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan, serta sifat khas delapan provinsi BKSDK sebagai daerah kepulauan dengan potensi kelautan yang besar namun menghadapi berbagai tantangan pembangunan, penelitian ini sangatlah relevan dan strategis. Penelitian penguatan ketahanan pangan melalui ekonomi biru di delapan provinsi BKSDK diharapkan dapat mengenali peluang dan kendala pelaksanaan *blue economy* di daerah kepulauan, menganalisis sumbangan ekonomi biru terhadap peningkatan ketahanan pangan, merumuskan strategi ketahanan pangan berbasis ekonomi biru yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem laut, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan kepulauan.

Penelitian ini berhubungan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab), serta SDGs 14 (Ekosistem Laut). Ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan melalui *blue economy* di provinsi kepulauan BKSDK tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pemenuhan target pembangunan berkelanjutan global.

Tabel 1 Capaian SDGs

Tujuan SDGs	Target SDGs	Capaian Indonesia hingga 2025
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	Sistem Pangan Berkelanjutan	Terdapat penurunan prevalensi kerawanan pangan pada 2025 sebesar 4%. Yang menggambarkan ketahanan pangan dalam kondisi baik
Tujuan 12 Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Efisiensi sumber daya laut & pengurangan degradasi
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	Konservasi & perikanan berkelanjutan	Perluasan kawasan konservasi sebesar 9,53% atau setara 30,9 juta Ha untuk perairan laut dan pengelolaan stok ikan

Sumber, Bappenas

Ekonomi biru secara global telah menjadi komponen utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan internasional disetujui negara – negara anggota PBB pada 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030. SDGs dibentuk untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dengan menangani masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta perdamaian dan keadilan. Setiap sasaran disertai dengan target dan indikator yang jelas untuk memantau pencapaian hingga tahun 2030, baik secara global maupun nasional (Hogan & Flaherty, 2021).



Gambar 1.1 Indikator SDGs 2,12,14

Sumber: Bappenas, SDGs

Sejalan dengan SDGs 2 yang berfokus pada penghapusan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang optimal, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, studi ini secara langsung menanggapi tantangan dalam penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan cukup bagi seluruh populasi (Andaiyani et al., 2024). Target SDGs 2 menegaskan pentingnya sistem produksi pangan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim (Sabatira et al., 2023).

Ekonomi Biru memberikan solusi dengan menggunakan sumber daya laut untuk meningkatkan ketersediaan pangan akuatik sebagai sumber protein utama bagi warga Indonesia. Penelitian (Andaiyani et al., 2024) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan di sejumlah provinsi di Indonesia. Peningkatan sektor perikanan dan akuakultur yang berlandaskan *blue economy* dapat meningkatkan hasil dan pendapatan para produsen, terutama nelayan dan petani ikan di daerah kepulauan, sesuai dengan tujuan 2.3 SDGs (Harriz & Akbariani, 2024). Oleh karena itu, penguatan ekonomi

biru di delapan provinsi BKSDK memiliki potensi untuk mengatasi masalah gizi dan kelaparan melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang berasal dari laut.

Angka Konsumsi Ikan dan Angka Kecukupan Protein adalah indikator penggunaan sumber daya kelautan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan AKI menunjukkan pergeseran konsumsi makanan bergizi dari sektor perikanan, sedangkan AKP menggambarkan tercapainya kecukupan protein, sejalan dengan tujuan SDGs 2 dalam perbaikan gizi dan akses terhadap pangan bergizi (Bappenas, 2021).

SDGs 12 menyoroti signifikansi pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam industri perikanan, ini direalisasikan melalui pengelolaan sumber daya ikan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pada ekosistem laut, selaras dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah makanan secara internasional (Aprilia, Mulyanie et al., 2023). Inovasi dalam pengolahan ikan tradisional yang efisien mampu menurunkan limbah dan meningkatkan nilai produk, sesuai dengan SDGs 12 mengenai konsumsi yang berkelanjutan (Puspitasari et al., 2023). Delapan provinsi kepulauan BKSDK, telah menerapkan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui *blue economy* akan memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan memberikan manfaat ekonomi jangka pendek dan menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

SDGs 14 menegaskan pentingnya konservasi dan penggunaan berkelanjutan ekosistem laut sebagai landasan keberlanjutan sumber daya laut,

Ekonomi Biru dalam konteks ini menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan usaha pelestarian ekosistem laut (Aulia Audrey Al Fahri, 2022). Laut berfungsi sebagai penyedia makanan dan penyimpan karbon terbesar, sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah ancaman perubahan iklim (Dewi et al., 2025).

Studi menunjukkan bahwa penerapan ekonomi biru dapat memperbaiki konservasi wilayah perairan sambil tetap memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat pesisir (Helmi Pratama Firmansyah, 2022). Di provinsi-provinsi kepulauan BKSDK yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, implementasi blue economy menjadi strategi yang efektif untuk meraih SDGs 14, terutama target 14.7 dengan cara meningkatkan sumbangan ekonomi sektor kelautan bagi negara – negara berkembang kepulauan (Nasution, 2022).

Pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan lewat ekonomi biru mendukung pelestarian keanekaragaman hayati laut Indonesia, termasuk terumbu karang, mangrove, serta berbagai spesies ikan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Pendekatan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam Rencana Pembangunan Ekonomi Biru yang diperkenalkan Kementerian PPN/Bappenas pada 2021 sebagai strategi untuk mentransformasi ekonomi nasional (Bappenas, 2021). Prinsip utama *blue economy* dalam sektor perikanan mencakup penggunaan sumber daya ikan sesuai dengan kapasitas ekosistem (penggunaan berkelanjutan), distribusi manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh pihak terkait, khususnya nelayan kecil (pertumbuhan inklusif), pengembangan teknologi dan model bisnis inovatif untuk

meningkatkan efisiensi dan nilai tambah (inovasi), pemanfaatan seluruh bagian ikan termasuk limbah menjadi produk bernilai ekonomi (limbah nol), serta implementasi ekonomi sirkular yang mengurangi ekstraksi dan meningkatkan daur ulang sumber daya (Pauli, 2009). Hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan tren nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia mulai pada tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.



Gambar 1 2 Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan tahun 2020-2024

Sumber : Website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diakses 11/2025

Sektor perikanan tangkap di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup stabil selama periode 2020 – 2024. Produksi naik dari 6.989.090 ton di 2020 dan berada di puncaknya pada 2023 yaitu sebesar 7.845.603, meskipun ada sedikit penurunan di 2024 menjadi 7.811.615 ton. Secara keseluruhan, hasil perikanan tangkap meningkat sebesar 11,77% selama periode tersebut.

Berdasarkan informasi dari *World Bank*, sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional dengan menyerap lebih dari 12 juta pekerja dan menyumbangkan sekitar 6% pada PDB nasional (*World Bank*,2022). Grafik menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap meningkat secara konsisten hingga 2024, sejalan dengan berakhirnya Covid-19 dan meningkatnya efisiensi pengelolaan laut. Tren ini sejalan dengan kemajuan nasional di mana hasil perikanan tangkap terus bertambah sejak 2014 dan mendukung pelaksanaan *blue economy* melalui peningkatan produktivitas (Bappenas, 2021).



Berdasarkan data laporan statistik kelautan dan perikanan tahun 2024, Pulau Jawa masih mendominasi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan total kontribusi mencapai 111.935 triliun rupiah. Jawa Timur tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan nilai 64.355 triliun rupiah, disusul Jawa Barat sebesar 24.517 triliun rupiah, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat nilai terendah di Pulau Jawa sebesar 679 miliar rupiah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Dalam

kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan kontribusi PDB sektor maritim, termasuk perikanan, mencapai 15% pada tahun 2045 (Bappenas, 2021).

Pencapaian target tersebut menuntut transformasi nyata sektor perikanan menuju prinsip *blue economy*. Ekonomi biru merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut, yang meliputi sektor perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Dalam kerangka ini, pertumbuhan PDB tidak sekadar mencerminkan ekspansi produksi, konsumsi, investasi, dan ekspor, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Sektor perikanan Indonesia mencatat laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan, industri manufaktur, konstruksi, dan jasa, meskipun kontribusinya terhadap PDB nasional masih relatif kecil (Chandra et al., 2021).

Kondisi ini menjadi semakin kontras ketika dihadapkan pada realita 8 Provinsi Kepulauan yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKSDK) yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kedelapan provinsi ini menyimpan potensi maritim yang luar biasa besar, namun belum tercermin secara proporsional dalam struktur ekonomi nasional. Kajian historis menunjukkan

bahwa ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa telah berlangsung sejak masa kolonial, di mana Jawa berperan sebagai perantara ekonomi yang memberi nilai tambah terhadap komoditas dari wilayah luar Jawa sebelum dijual ke pasar internasional — sebuah pola yang terus bertahan hingga era kemerdekaan (Rinardi et al., 2023)

Paradoks terbesar justru terletak pada kenyataan bahwa wilayah kepulauan yang kaya sumber daya laut justru mencatat angka kemiskinan tertinggi. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan relatif di Indonesia terkonsentrasi di provinsi-provinsi kepulauan, dan dari sisi kedalaman kemiskinan, NTT, Maluku, dan Papua Barat tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling parah dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Mansur, 2024). Lebih lanjut, penelitian literatur tentang kemiskinan di wilayah pesisir menegaskan bahwa degradasi lingkungan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dampak perubahan iklim menjadi faktor utama yang memperburuk kemiskinan di kawasan pesisir kepulauan (Ramadi et al., 2024).

Studi komparatif ketimpangan antarpulau di Indonesia menggunakan Indeks Williamson (2016–2020) menemukan bahwa Pulau Nusa Tenggara dan Papua masuk kategori ketimpangan tinggi, sementara Pulau Jawa masuk kategori ketimpangan sangat tinggi — mengindikasikan bahwa ketimpangan internal di Jawa maupun kesenjangan antarwilayah kepulauan sama-sama masih dalam tingkat yang mengkhawatirkan (Panggarti et al., 2022). Di sisi potensi, potensi ekonomi perikanan di

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang meliputi perairan Maluku dan sekitarnya hingga kini belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan pengelolaan yang tidak tepat sasaran (Fretes, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan PDRB di provinsi kepulauan belum otomatis berkorelasi dengan pemerataan kesejahteraan.

Kajian urgensi implementasi *blue economy* dalam tata kelola kelautan Indonesia menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional, dengan orientasi pada keberlanjutan dan keadilan (Darajati, 2024). Di sinilah peran BKSDK menjadi sangat strategis: sebagai platform kolaborasi antardaerah kepulauan untuk mendorong pemerataan investasi, pengembangan rantai nilai perikanan yang berkeadilan, dan percepatan pembangunan kawasan kepulauan yang selama ini tertinggal dalam struktur ekonomi nasional.

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan perikanan merupakan ukuran yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam sektor kelautan dan perikanan. Tujuan dibuat indeks ini adalah untuk mencerminkan situasi ekonomi dan sosial, komunitas pesisir, serta aktor utama dalam sektor perikanan.



Gambar 1 4 Indeks Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Sumber : Laporan Balai Riset Kelautan dan Perikanan,KKP, tahun publikasi 2024

Indeks Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kelautan dan Perikanan (IKMKP) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, naik dari 58,31 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas konsumsi pangan, terutama protein hewani dari laut. Di sektor produksi, peningkatan nilai hasil perikanan tangkap memperkuat kapasitas pasokan makanan laut, mendukung ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta menegaskan peran sektor perikanan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyumbang PDB.

Peningkatan NTN menunjukkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan nelayan yang secara struktural mendukung peningkatan IKMKP. NTN berperan sebagai jembatan antara hasil tangkapan, pemasukan, dan kesejahteraan sosial para nelayan. Oleh karena itu, peningkatan IKMKP adalah akibat dari interaksi sistematis antara aspek AKI dan AKP, produksi (Perikanan Tangkap), kesejahteraan pelaku (NTN), serta kontribusi ekonomi makro (PDB)



Gambar 1 5 Konsumsi Ikan 2020-2024

Sumber : Susenas, data diolah ditjen PDSPKP, tahun publikasi 2024

Berdasarkan grafik, konsumsi ikan menunjukkan tren kenaikan setiap tahun, dari 54,56 pada 2020 menjadi 59,00 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan berkembangnya kesadaran masyarakat tentang ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi, sekaligus sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Konsumsi ikan bertambah seiring dengan kestabilan perikanan tangkap dan kampanye nasional, mendukung ketahanan pangan serta ekonomi biru pemerintah mendorong Gerakan Konsumsi Ikan menargetkan 62,5 kg per orang pada 2024, meningkat dari 56,39 kg pada 2020. Perkembangan AKI di delapan provinsi kepulauan antara 2020 dan 2024 menunjukkan bahwa konsumsi ikan sangat penting untuk ketahanan pangan dan berpotensi menangani defisiensi mikronutrien bagi 30% dari populasi yang sekitar 200 juta orang (Muringai et al., 2022).

Peningkatan yang berkelanjutan ini mencerminkan penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan di provinsi-provinsi kepulauan, didorong oleh

keberadaan sumber daya laut, reformasi kebijakan perikanan, kemajuan industri pengolahan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai ikan sebagai sumber protein utama. Akan tetapi, perbedaan antara provinsi masih jadi tantangan, sehingga pengembangan infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan sistem rantai dingin tetap perlu untuk memastikan keberlangsungan ketahanan pangan ke depan.

Tingginya konsumsi ikan di provinsi kepulauan dipengaruhi oleh faktor geografis, akses mudah terhadap sumber daya perikanan, dan budaya konsumsi ikan yang kental. Akan tetapi, terdapat variasi dalam tingkat konsumsi antarprovinsi, di mana Maluku, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara mencatatkan konsumsi paling tinggi, sejalan dengan adanya dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih baik dan perkembangan industri pengolahan ikan yang relatif maju.

Sebaliknya, NTT yang memiliki tingkat konsumsi ikan terendah di antara provinsi kepulauan menghadapi kendala distribusi dan aksesibilitas akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya perikanan saja tidak cukup menjamin konsumsi yang optimal tanpa dukungan infrastruktur dan sistem distribusi yang efisien. Dalam perspektif *blue economy*, peningkatan konsumsi ikan perlu diimbangi dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, serta diversifikasi olahan ikan guna mendorong konsumsi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Nilai tukar nelayan (NTN) adalah indikator kesejahteraan yang mengukur daya beli nelayan sebagai rasio antara indeks harga yang diterima dan indeks harga

yang dibayar nelayan. (Amandra & Zulbainarni, 2022). NTN yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa pendapatan nelayan lebih tinggi daripada pengeluarannya. Yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika NTN kurang dari 100 mengindikasikan penurunan daya beli dan kesejahteraan nelayan. Data menunjukkan bahwa NTN Indonesia khususnya delapan provinsi kepulauan pada tahun 2020-2024 yang akan dijelaskan dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1 6 Nilai Tukar Nelayan

Sumber :Laporan Capaian Kinerja Kementerian Kelautan RI, data diolah.

Gambar di atas menunjukkan pola perubahan yang mencerminkan dinamika ekonomi makro di Indonesia. NTN yang mencapai 102,55 pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 108,2463 (naik sebesar 5,6963 poin indeks), yang dipacu oleh respons kebijakan moneter selama pandemi global. Memasuki tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 103,8513 (turun sebesar 4,3950 poin indeks), di tahun 2023 NTN kembali mengalami kenaikan menjadi 106,4675 (naik sebesar 2,6162 poin indeks), dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 104,0325 (turun sebesar 2,4350 poin indeks). Kondisi NTN bersifat fluktuatif akibat adanya Covid-19 pada tahun 2020–2022 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sedangkan pada tahun

2023 ekonomi mulai pulih seiring waktu hingga tahun 2024 NTN kembali mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal seperti peningkatan suku bunga global oleh The Fed, penurunan harga komoditas, serta dampak cuaca ekstrem pada produktivitas *blue economy*, yang secara keseluruhan menekan neraca perdagangan Indonesia.



Gambar 1 7 Angka Kecukupan Protein

Sumber : Kementerian Kelautan RI 2020-2024, data diolah

Kandungan gizi pada ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang tinggi, yaitu berkisar antara 18-25%. Di samping itu, ikan mengandung omega-3, vitamin D, vitamin B12, selenium, dan yodium yang berkontribusi besar terhadap perkembangan otak, pencegahan stunting, serta kesehatan jantung (FAO, 2020). Kebutuhan protein disarankan antara 7–20% dari total energi harian atau sekitar 0,83 gram/kg berat badan untuk orang dewasa (Xipsiti, 2024).

Grafik Angka Kecukupan Protein (AKP) menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Di tahun 2020, AKP tercatat sebesar 104,9100 Kg/kapita, dan pada tahun 2021 nilai AKP mengalami kenaikan yang sangat tipis menjadi 104,9125 Kg/kapita (naik sebesar 0,0025 Kg/kapita) seiring dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian naik pesat pada

2022 menjadi 109,5375 Kg/kapita (naik sebesar 4,6250 Kg/kapita). Pada tahun 2023 AKP mengalami penurunan menjadi 108,9750 Kg/kapita (turun sebesar 0,5625 Kg/kapita), dan pada 2024 AKP kembali turun menjadi 107,7125 Kg/kapita (turun sebesar 1,2625 Kg/kapita) akibat pengaruh cuaca ekstrem dan inflasi pangan. Penurunan AKP ini menunjukkan keterbatasan kemampuan masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan berskala kecil, dalam memenuhi kebutuhan protein harian secara memadai, sehingga mereka tetap rentan terhadap ancaman kemiskinan dan kekurangan gizi. (Agam, 2022).

Sektor perikanan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi wilayah kepulauan melalui peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan daerah. PDB sektor perikanan mencerminkan nilai ekonomi dari aktivitas penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB provinsi kepulauan umumnya lebih tinggi dibandingkan sumbangannya terhadap PDB nasional yang berkisar 2,85%, meskipun laju pertumbuhannya bervariasi tergantung pada kondisi lokal, infrastruktur, dan kebijakan daerah.

Penelitian ini menganalisis pengaruh berbagai variabel perikanan terhadap ketahanan pangan dalam konteks *blue economy* serta implikasinya pada pembangunan yang berkelanjutan. Urgensi pada penelitian ini terletak pada upaya menyediakan dasar untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang berfokus pada *blue economy*, sehingga pengembangan sektor kelautan tidak

hanya bertujuan pada peningkatan produksi, tetapi pada penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah berbeda dari studi sebelumnya karena pendekatannya lebih fokus dan terintegrasi. Penelitian ini menggabungkan indikator ketahanan pangan berbasis ekonomi perikanan seperti tingkat konsumsi ikan, kecukupan protein, nilai tukar nelayan, produk domestik bruto, dan nilai produksi perikanan tangkap yang tidak hanya menopang pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan pada kerangka *blue economy* yang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada penelitian ini adalah menggunakan delapan provinsi kepulauan yang digabungkan dalam satu kerangka yang mengandalkan data panel.

1.2 Rumusan Masalah

Ketahanan pangan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait pemenuhan ketersediaan pangan bergizi, stabilitas pasokan, serta ketimpangan akses pangan antar wilayah. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan potensi sumber daya kelautannya yang besar, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem ketahanan pangan nasional. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap disebabkan oleh beberapa faktor yaitu AKI, AKP, NTN, dan PDB. Variabel tersebut dipilih dalam penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam mendukung capaian Sdgs 2, 12, dan 14.

Sehingga didapatkan beberapa pertanyaan penelitian guna mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh angka konsumsi ikan terhadap nilai produksi perikanan tangkap terhadap ketahanan pangan ?
2. Bagaimana pengaruh nilai tukar nelayan terhadap nilai produksi perikanan tangkap terhadap ketahanan pangan?
3. Bagaimana pengaruh angka kecukupan protein terhadap nilai produksi perikanan tangkap terhadap ketahanan pangan?
4. Bagaimana pengaruh PDB perikanan terhadap nilai produksi perikanan tangkap terhadap ketahanan pangan?
5. Bagaimana pengaruh angka konsumsi ikan, nilai tukar nelayan, angka kecukupan protein, dan PDB perikanan secara simultan berpengaruh terhadap ketahanan pangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Angka Konsumsi Ikan, Nilai Tukar Nelayan, Angka Kecukupan Protein, dan PDB Perikanan terhadap Nilai Produksi Perikanan Tangkap. Berikut ini adalah tujuan dari penulisan skripsi :

1. Menganalisis Angka Konsumsi Ikan terhadap ketahanan pangan
2. Menganalisis Nilai Tukar Nelayan terhadap ketahanan pangan
3. Menganalisis Angka Kecukupan Protein terhadap ketahanan pangan
4. Menganalisis PDB Perikanan terhadap ketahanan pangan

5. Menganalisis Angka Konsumsi Ikan, Nilai Tukar Nelayan, Angka Kecukupan Protein, dan PDB terhadap ketahanan pangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dalam bidang akademis diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat menjadi referensi bagi yang ingin meneliti dengan kajian yang serupa.
2. Manfaat bagi para pembaca yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat serta memberikan wawasan baru mengenai ketahanan pangan di Indonesia.
3. Manfaat praktis yaitu memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program lanjutan yang lebih efektif bagi masyarakat dan penguatan ketahanan pangan nasional.

1.5 Sistematika Bab

Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan, skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan ringkasan.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama skripsi terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II yang berisi mengenai landasan teori yang sesuai dengan hasil studi empiris, model penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang pembahasan mengenai gambaran umum objek atau data penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi rangkuman dari kesimpulan hasil analisis penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang didasarkan temuan dari hasil penelitian.